

## ABSTRAK

Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sangat penting. Lingkungan yang lebih transparan, peningkatan partisipasi publik, serta penegakan hukum yang tegas dapat membantu mewujudkan proses pengadaan yang adil, efisien, dan jujur. Namun informasi yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya dianggap sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik. Terutama berlaku selama proses evaluasi penyedia. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Metode analisi yang di gunakan adalah Deskriptif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara objektif.

Unsur penting dalam keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah menanggulangi berbagai masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti korupsi, diskriminasi, nepotisme, serta pemborosan anggaran. Dalam mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah penerapan peraturan perundang-undangan pada saat pembelian barang maupun jasa merupakan hal yang sangat penting demi menjamin kejujuran, efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Demi mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara pemerintahan untuk mewujudkan *Good governance*, peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus diperbarui dan dimodifikasi secara berkala. Hal ini akan mendukung dan menjaga kesopanan, kejujuran, serta kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah melakukan pembelian produk dan layanan.

**Kata kunci: Pengaturan, Keterbukaan, Pengadaan, Barang, Jasa, Informasi.**

## **ABSTRACT**

*Openness in the procurement of goods and services is very important. A more transparent environment, increased public participation, and strong law enforcement can help realize fair, efficient, and honest procurement processes. However, information involved in the process of procurement of government goods and services is usually considered as exempt information and cannot be accessed by the public. Especially true during the provider evaluation process. The writing of this law will discuss how to regulate public information disclosure in the payment of government goods and services. The method used in this study is a normative legal approach, normative legal research is a type of legal research that uses law as a norm system structure.*

*This norm system includes principles, norms, rules, agreements, doctrines, and court decisions. Research specifications are descriptive analytical, which means describing applicable laws and regulations associated with legal theories and implementation practices. The analysis method used is juridical descriptive, which is research conducted with the main aim of providing an overview or description of the situation objectively.*

*An important element in public information disclosure in the procurement of government goods and services is to overcome various unwanted problems such as corruption, discrimination, nepotism, and budget wastage. In regulating the disclosure of information on the procurement of government goods and services, the application of laws and regulations when purchasing goods and services is very important in order to ensure honesty, effectiveness, and accountability in the use of public funds. In order to keep up with technological advances and changes in the way governments realize good governance, regulations governing public information disclosure regarding the procurement of goods and services by the government must be updated and modified regularly. This will support and maintain public courtesy, honesty, and trust in the way the government purchases products and services.*

**Keywords: Regulation, Openness, Procurement, Goods, Services, Information.**